

**ANALISIS TIPOLOGI DAERAH BERDASARKAN KLASIFIKASI  
INFRASTRUKTUR DAN BELANJA MODAL DI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi(S1)*

*Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP)*



OLEH:

YOGI ADI RIYANTO

2015/15060066

**Program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS TIPOLOGI DAERAH BERDASARKAN KLASIFIKASI INFRASTRUKTUR  
DAN BELANJA MODAL DI SUMATERA BARAT**

Nama : Yogi Adi Riyanto  
TM / NIM : 2015 / 15060066  
Juruan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Perencanaan  
Fakultas : Ekonomi

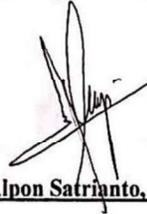
Padang, 26 Januari 2023

Mengetahui,  
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi



**Dr. Novva Zulva Riani, S.E, M.Si**  
NIP. 19711104 200501 2 001

Disetujui oleh :  
Pembimbing



**Dr. Alpon Satrianto, S.E, M.E**  
NIP. 19850909 201404 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

### ANALISIS TIPOLOGI DAERAH BERDASARKAN INFRASTRUKTUR DAN BELANJA MODAL DI SUMATERA BARAT

Nama : Yogi Adi Riyanto  
Bp/Nim : 2015/15060066  
Keahlian : Ekonomi Perencanaan  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 29 Agustus 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Dr. Alpon Satrianto, S.E, M.E.	1. 
2.	Anggota	: Dr. Novya Zulva riani, S.E, M.Si.	2. 
3.	Anggota	: Dr. Zul Azhar, M.Si.	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yogi Adi Riyanto  
Nim / Tahun Masuk : 15060066 / 2015  
Tempat / Tanggal Lahir : Mulia Bakti / 20 November 1996  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Perencanaan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jorong Koto Mudik, Nagari Kurnia Selatan,  
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya  
No HP / Telepon : 0823 8801 6174  
Judul Skripsi : Analisis Tipologi Daerah Berdasarkan Klasifikasi  
Infrastruktur Dan Belanja Modal Di Sumatera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Negeri Padang ataupun Perguruan Tinggi lainnya
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Pada karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis ataupun di publikasikan kecuali tertulis jelas di dalam daftar Pustaka
4. Karya tulis / skripsi ini SAH apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena adanya karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 30 Januari 2023

  
050AKX193499249 **Adi Riyanto**

## ABSTRAK

**Yogi Adi Riyanto 2015/15060066 Analisis Tipologi Daerah Berdasarkan Klasifikasi Infrastruktur Dan Belanja Modal Di Sumatera Barat, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan dosen Pembimbing Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME.**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis (1) klasifikasi tipologi daerah terhadap infrastruktur jalan, (2) klasifikasi tipologi daerah terhadap infrastruktur listrik dan juga (3) klasifikasi tipologi daerah terhadap belanja modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan data yang digunakan adalah jenis data panel yaitu data gabungan dari data time-series dan data cross-section dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang didapatkan dari perpustakaan maupun dari lembaga dan instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana klasifikasi tipologi daerah terhadap infrastruktur jalan, bagaimana klasifikasi tipologi daerah terhadap infrastruktur listrik, serta bagaimana klasifikasi tipologi daerah terhadap belanja modal.

Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Pada klasifikasi tipologi daerah infrastruktur jalan tahun analisis 2016-2018 terhadap tahun analisis 2019-2021, terjadi perubahan kepada Kepulauan Mentawai dari Daerah Berkembang ke Daerah Maju, terjadi perubahan kepada kabupaten Pasaman Barat dan Sijunjung dari Daerah Potensial ke Daerah Terbelakang. (2) Pada klasifikasi tipologi daerah infrastruktur listrik tahun analisis 2016-2018 terhadap tahun analisis 2019-2021, tidak ada terjadi perubahan pada tiap kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat. (3) Pada klasifikasi tipologi daerah belanja modal tahun analisis 2016-2018 terhadap tahun analisis 2019-2021, terjadi perubahan kepada Kota Bukittinggi dari Daerah Maju ke Daerah Berkembang .

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan Pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan aset tetap seperti infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik agar dapat menambah kesejahteraan masyarakat. Dan juga pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat agar dapat tepat melakukan pembelanjaan modal kepada aset yang menunjang kenaikan perekonomian Sumatera Barat itu sendiri..

Kata kunci : Tipologi Daerah, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Listrik, Belanja Modal, PDRB Perkapita.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Tipologi Daerah Berdasarkan Klasifikasi Infrastruktur Dan Belanja Modal Di Sumatera Barat” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala baik yang mudah sampai kendala yang sulit sekalipun. Namun berkat bantuan, kerjasama, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak serta tak lupa karena berkah, nikmat dan kesempatan dari Allah SWT sehingga semua kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Teruntuk Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME, terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan. Terimakasih telah sangat meluangkan waktu, tenaga, pikiran dengan tulus dan ikhlas untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan di hadiahkan Surga tanpa hisab di Akhirat kelak. Aamiin

Selanjutnya, tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk ibu tercinta yang telah memberikan dan mengorbankan segalanya, ibu sudah bagaikan teman dan sahabat tidak hanya memotivasi dalam pendidikan tapi doa ibu selalu ada disetiap saat demi anaknya ini. yang tak henti memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Teruntuk ayah tercinta yang selalu memotivasi dan tegas dalam memberikan arahan agar lebih menjadi manusia yang lebih baik kelak. semua pembelajaran yang beliau ajarkan sangat berguna dalam melanjutkan kehidupan ini.
3. Terimakasih untuk keluarga besar, khususnya Bella Triana, S.Si dan Andri Riyanto yang selalu memberikan dorongan dan doa-doa terbaiknya.
4. Bapak Dr. Idris, M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Melti Roza Adry, SE. ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE.MM selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME. Yang telah membimbing skripsi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.S.i dan Bapak Dr. Zul Ahzar, SE, M.Si sebagai penguji skripsi penulis
8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah bersedia memberikan transfer ilmu dari awal perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.
9. Saudara penulis, Ardi Romansyah, S.Pd, Riko Riskianto, S.Pd dan Widhi ananto yang telah memberi semangat penulis selama menjalani proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Oki Riyanto, Dede Mulyadi Gunawan, S.T, Imamul Khabibi, S.Kom, Doris Permana, S.Kom, Riko Valentino, S.Pd, Esma Eko Sugiarto, Rio Irawan,

Panji Sanjaya dan A.Md dan Ardiansyah Putra, S.T, yang telah menemani penulis selama menjalani kuliah di Universitas Negeri Padang.

11. Kepada sesepuh Nora Afryandi A.Md, Selvi Arista S.Pd, Roydo Ari Permana S.Kom dan Yolanda Boma, S.H yang telah memberi nasihat terhadap penulis dalam membuat skripsi ini.
12. Sahabat penulis Agus setiawan, S.E dan Reski Juli Manda, S.E terimakasih telah menjadi pendengar setia selama menjalani proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada anak kosan Bunda Nurana, Abdi, Nanda, Ijung, Firman yang telah banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Keluarga Ilmu Ekonomi 2015 yang telah sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sekarang yang tak dapat disebutkan satu per satu.
15. *Last but not least, I want thanks me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.*
16. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda nantinya.untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dengan tulus, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Padang, Agustus 2022 Penulis

Yogi Adi Riyanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Kajian Teori.....	17
1. Teori Pembangunan.....	17
2. Teori Neo-Klasik.....	20
3. Tipologi Daerah.....	21
4. Infrastruktur.....	24
5. Belanja Modal.....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Definisi Operasional.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	43
1. Analisis Deskriptif.....	43

2. Analisis Induktif.....	49
C. Pembahasan.....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PDRB perkapita provinsi Sumatera Barat.....	13
Tabel 2.1 Klasifikasi Perhitungan Tipologi Daerah.....	23
Tabel 3.1 Perhitungan tipologi daerah berdasarkan infrastruktur jalan.....	39
Tabel 3.2 Perhitungan tipologi daerah berdasarkan infrastruktur listrik.....	40
Tabel 3.3 Perhitungan tipologi daerah berdasarkan belanja modal.....	41
Tabel 4.1 Jumlah infrastruktur jalan menurut kab/kota di provinsi di Sumatera Barat tahun 2016-2021.....	44
Tabel 4.2 Jumlah infrastruktur listrik menurut kab/kota di provinsi di Sumatera Barat tahun 2016-2021.....	46
Tabel 4.3 Jumlah belanja modal menurut kab/kota di provinsi di Sumatera Barat tahun 2016-2021.....	48
Tabel 4.4 Hasil perhitungan rata-rata infrastruktur jalan dan rata-rata PDRB perkapita di Sumatera Barat tahun 2016-2018 dan 2019-2021.....	50
Tabel 4.5 Klasifikasi perhitungan tipologi daerah terhadap infrastruktur jalan di provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2018.....	51
Tabel 4.6 Klasifikasi perhitungan tipologi daerah terhadap infrastruktur jalan di provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021.....	52
Tabel 4.7 Hasil perhitungan rata-rata infrastruktur listrik dan rata-rata PDRB perkapita di Sumatera Barat tahun 2016-2018 dan 2019-2021.....	54
Tabel 4.8 Klasifikasi perhitungan tipologi daerah terhadap infrastruktur listrik di provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2018.....	55
Tabel 4.9 Klasifikasi perhitungan tipologi daerah terhadap infrastruktur listrik di provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021.....	56

Tabel 4.10 Hasil perhitungan rata-rata belanja modal dan rata-rata PDRB perkapita di Sumatera Barat tahun 2016-2018 dan 2019-2021.....	58
Tabel 4.11 Klasifikasi perhitungan tipologi daerah terhadap belanja modal di provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2018.....	59
Tabel 4.12 Klasifikasi perhitungan tipologi daerah terhadap belanja modal di provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah infrastruktur jalan menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2018 .....	4
Gambar 1.2 Jumlah infrastruktur jalan menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021 .....	5
Gambar 1.3 Jumlah infrastruktur listrik menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2018 .....	6
Gambar 1.4 Jumlah infrastruktur listrik menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021 .....	7
Gambar 1.5 Jumlah belanja modal menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2018 .....	9
Gambar 1.6 Jumlah belanja modal menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021 .....	10
Gambar 2.1 Kurva Kuznet .....	18
Gambar 2.2 Kurva Lorenz .....	20
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual .....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Tipologi Daerah berdasarkan klasifikasi infrastruktur jalan 2016-2018 .....	74
Lampiran 2 Hasil Tipologi Daerah berdasarkan klasifikasi infrastruktur jalan 2019-2021 .....	74
Lampiran 3 Hasil Tipologi Daerah berdasarkan klasifikasi infrastruktur listrik 2016-2018 .....	75
Lampiran 4 Hasil Tipologi Daerah berdasarkan klasifikasi infrastruktur listrik 2019-2021 .....	75
Lampiran 5 Hasil Tipologi Daerah berdasarkan klasifikasi belanja modal 2016-2018 .....	76
Lampiran 6 Hasil Tipologi Daerah berdasarkan klasifikasi belanja modal 2019-2021 .....	76
Lampiran 7 Data PDRB perkapita 2016-2021.....	77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pembangunan ekonomi merupakan indikator dalam melihat ukuran keberhasilan suatu perekonomian di suatu wilayah. Pembangunan ekonomi diartikan secara umum sebagai kenaikan output umum barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam teori ilmu ekonomi, pembangunan dikenali bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan terjadi tradeoff. Apabila program pembangunan dititik beratkan pada pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi tetapi tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan dan distribusi pendapatan cenderung timpang, sebaliknya jika pembangunan lebih dititikberatkan pada program pemerataan, maka distribusi pendapatan akan lebih baik, tetapi pertumbuhan ekonomi cenderung lebih rendah. (Lestari, 2021).

Pembangunan ekonomi disuatu wilayah dapat dikatakan berhasil jika hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan pada wilayah tersebut (Sukirno, 2010). Oleh karena itu identifikasi berbagai macam faktor yang mempengaruhi termasuk infrastruktur jalan, infrastruktur listrik dan juga belanja modal dari pemerintah menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan ekonomi. Sektor ini pada dasarnya merupakan sektor antara yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi agar dapat bergerak. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah yang kurang/masih berkembang. Pembangunan prasarana air, listrik dan komunikasi merupakan beberapa sektor penting yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari maupun untuk kepentingan peningkatan perekonomian masyarakat/daerah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita pada masyarakat daerah tersebut. (Nuraini, 2019).

Infrastruktur yang memberikan pengaruh besar pada pembangunan ekonomi dapat berupa kondisi jalan raya yang menjadi penghubung satu wilayah ke wilayah lainnya, keberadaan listrik sebagai sumber utama dalam kegiatan produksi serta akses terhadap air bersih dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan juga belanja modal yang diberikan pemerintah guna untuk meningkatkan infrastruktur dalam menjalankan roda perekonomian daerah. (Sukwika Tatan, 2018).

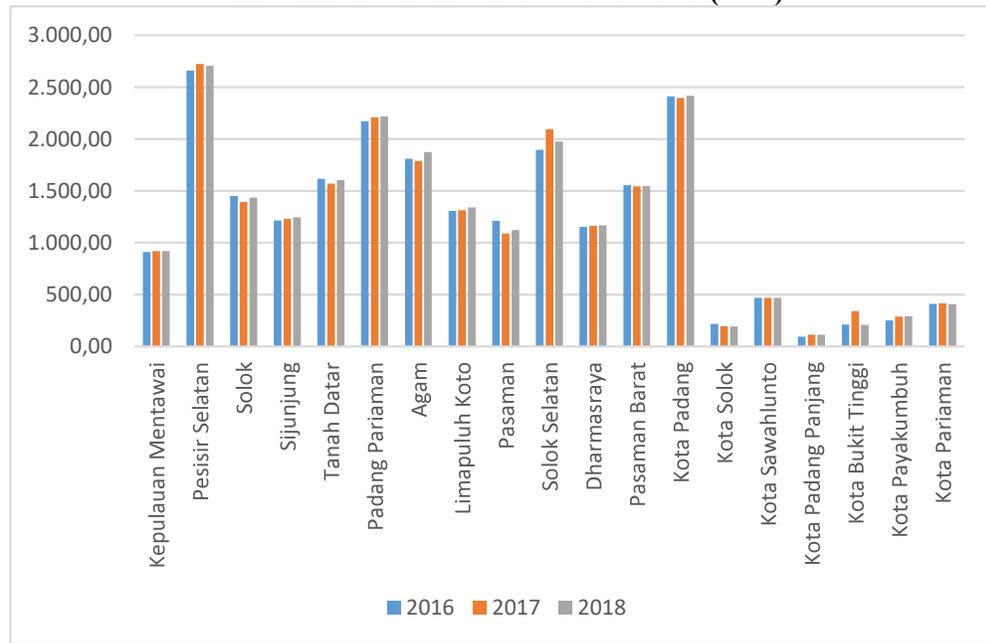
Tersedianya infrastruktur suatu daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi wilayah tersebut, karena infrastruktur memiliki posisi yang sangat penting dalam keberadaan perekonomian suatu daerah tersebut sebagai pendorong produktivitas output dan melakukan kegiatan ekonomi. Maka dari itu penelitian ini akan melakukan penelitian yang terfokus pada

infrastruktur air, listrik dan jalan, yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat sehari-hari dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur di antara lain adalah Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Jalan Air, dan Infrastruktur Irigasi. Untuk pembahasan yang digunakan dalam proposal ini adalah infrastruktur jalan, infrastruktur listrik dan juga belanja modal. Namun pembangunan infrastruktur ekonomi berupa infrastruktur jalan, dan listrik di Sumatera Barat masih belum merata, sehingga daerah yang memiliki kualitas infrastruktur yang baik akan memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah yang memiliki kualitas infrastruktur rendah. Dengan demikian masalah ketidak merataan infrastruktur akan berefek pada pendapatan perkapita di wilayah tersebut.

Dengan dibangunnya infrastruktur, tingkat produktivitas, perusahaan dan sektor pertanian akan meningkat. Salah satunya yang paling terlihat adalah pembangunan jalan. Disinilah infrastruktur dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan, yakni dengan meningkatkan akses baik kaum miskin dan akses bagi intervensi pemerintah untuk lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Akses yang lebih baik akan mampu mengurangi biaya hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka kesempatan bagi kaum miskin untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi (Caning dan Pedroni, 2004). Data ketersediaan infrastruktur jalan dapat di lihat dari gambar 1.1 sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Infrastruktur Jalan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018 (KM)**



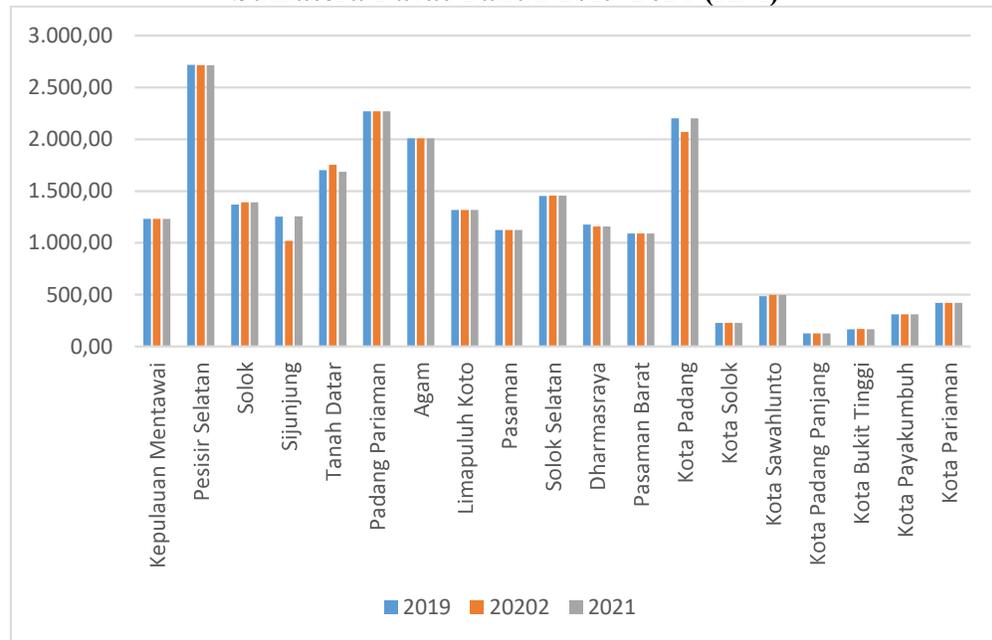
Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan nilai panjang jalan dan luas wilayah menurut kabupaten dan kota seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah panjang infrastruktur jalan tertinggi berada di kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah jalan paling panjang terletak di kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata 2.697,79 km pada tahun 2016-2018. Serta jumlah infrastruktur jalan paling pendek terletak di kota Padang Panjang dengan rata-rata hanya sekitar 108,41 km pada tahun yang sama.

Berdasarkan gambar 1.1 terjadi perbedaan yang cukup mencolok pada satu daerah dengan daerah lainnya. Terjadi ketimpangan infrastruktur jalan tersebut dapat dilihat dari selisih panjang jalan di setiap kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat. Dimana terdapat perbedaan yang cukup jauh pada

tiap-tiap wilayah di provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya adalah jumlah infrastruktur jalan yang digunakan menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019-2021.

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Infrastruktur Jalan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021 (KM)**

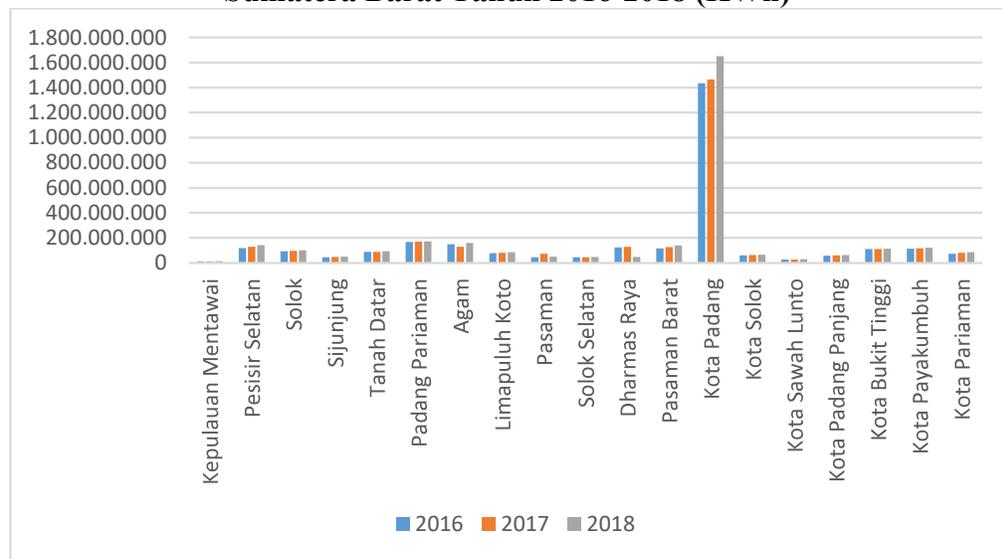


Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan nilai panjang jalan dan luas wilayah menurut kabupaten dan kota seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2, dapat diketahui bahwa jumlah panjang infrastruktur jalan tertinggi berada di kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah jalan paling panjang terletak di kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata 2.714,70 km pada tahun 2016-2018. Serta jumlah infrastruktur jalan paling pendek terletak di kota Padang Panjang dengan rata-rata hanya sekitar 125,58 km pada tahun yang sama.

Berdasarkan gambar 1.2 terjadi perbedaan yang cukup mencolok pada satu daerah dengan daerah lainnya. Terjadi ketimpangan infrastuktur jalan tersebut dapat dilihat dari selisih panjang jalan di setiap kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat. Dimana terdapat perbedaan yang cukup jauh pada tiap-tiap wilayah di provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya adalah jumlah infrastruktur listrik yang digunakan menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2018.

**Gambar 1.3**  
**Jumlah Infrastruktur Listrik Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018 (KWh)**

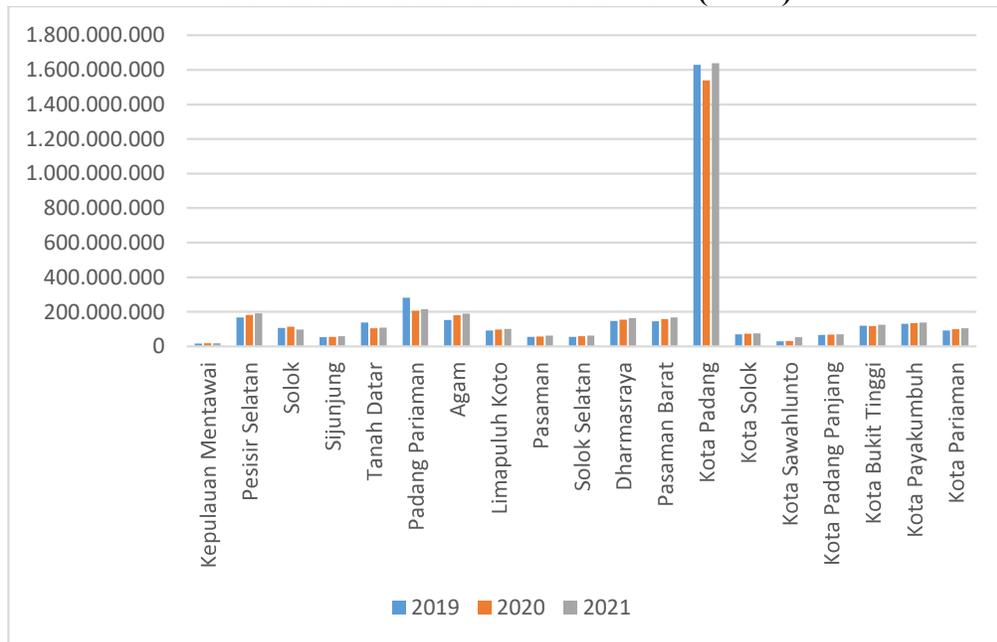


Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan jumlah penggunaan listrik yang terpakai menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan yang sangat tinggi terutama pada kota Padang dengan daerah lainnya. Wilayah paling makmur terdapat di kota Padang dengan rata-rata tahun 2016-2018 berkisar 1.517.303.286,00 Kwh listrik terpakai. Sementara pada

wilayah lain hanya mencapai rata-rata sekitar 86.997.212,48 Kwh listrik terpakai. Ini menandakan terjadinya ketimpangan yang sangat jauh antara satu wilayah terhadap wilayah lainnya di provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya adalah jumlah infrastruktur listrik yang digunakan menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019-2021.

**Gambar1.4**  
**Jumlah Infrastruktur Listrik Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021 (KWh)**



Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan jumlah penggunaan listrik yang terpakai menurut kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan yang sangat tinggi terutama pada kota Padang dengan daerah lainnya. Wilayah paling makmur terdapat di kota Padang dengan rata-rata dalam tiga tahun berkisar 1.607.513.307,00 Kwh listrik terpakai. Sementara wilayah dengan pemakaian listrik terendah berada pada Kepulauan Mentawai

yang hanya mencapai rata-rata sekitar 16.725.781,33 Kwh listrik terpakai pada tahun yang sama. Ini menandakan terjadinya ketimpangan yang sangat jauh antara satu wilayah terhadap wilayah lainnya di provinsi Sumatera Barat.

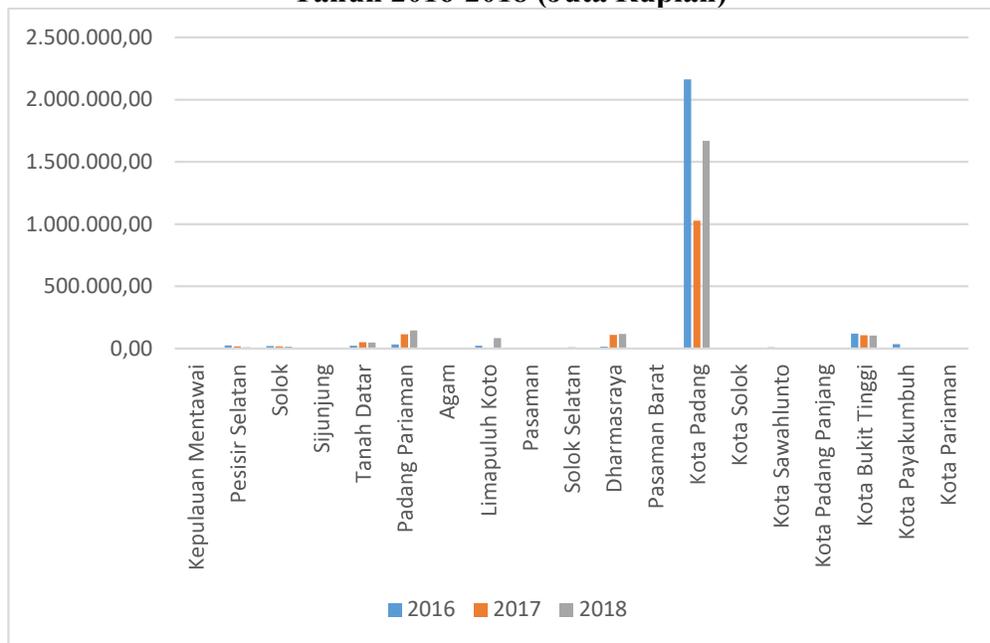
Perbedaan yang cukup tinggi pada infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik, maka pemerintah mau tidak mau harus melakukan pembangunan pada daerah yang memiliki infrastruktur tertinggal, sehingga akan menjadikan pemerataan secara infrastruktur pada wilayah tersebut. Dan dalam jangka panjang akan menaikkan jumlah pendapatan serta akan menjadi pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur ditinjau dari aspek kepentingan masyarakat dapat meningkatkan transformasi informasi dan kemudahan akses yang menghubungkan antar wilayah, baik antar wilayah pemerintahan pedesaan, antar pemerintahan kecamatan bahkan kemudahan akses menuju ibukota kabupaten.

Mencermati betapa pentingnya infrastruktur dalam kehidupan masyarakat, disamping untuk meningkatkan pembangunan maka cukup beralasan jika setiap wilayah dibangunnya infrastruktur yang memadai. Dengan adanya kesenjangan yang sangat signifikan, maka pemerintah Sumatera Barat melakukan adanya pemberian belanja modal ke tiap daerah di provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur untuk diharapkan perekonomian di wilayah tersebut berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan pada pendapatan perkapita.

Belanja modal akan memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah, pemberian belanja modal pada tiap-tiap

wilayah akan meningkatkan pendapatan pada wilayah tersebut jika dapat dikelola dengan maksimal. Tepatnya pembelajaan modal yang dilakukan oleh pemerintah akan secara signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi diwilayah tersebut. Berikut adalah data belanja modal yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Barat per periode 2016-2021 (dalam ribuan rupiah).

**Gambar 1.5**  
**Jumlah Belanja Modal Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2018 (Juta Rupiah)**

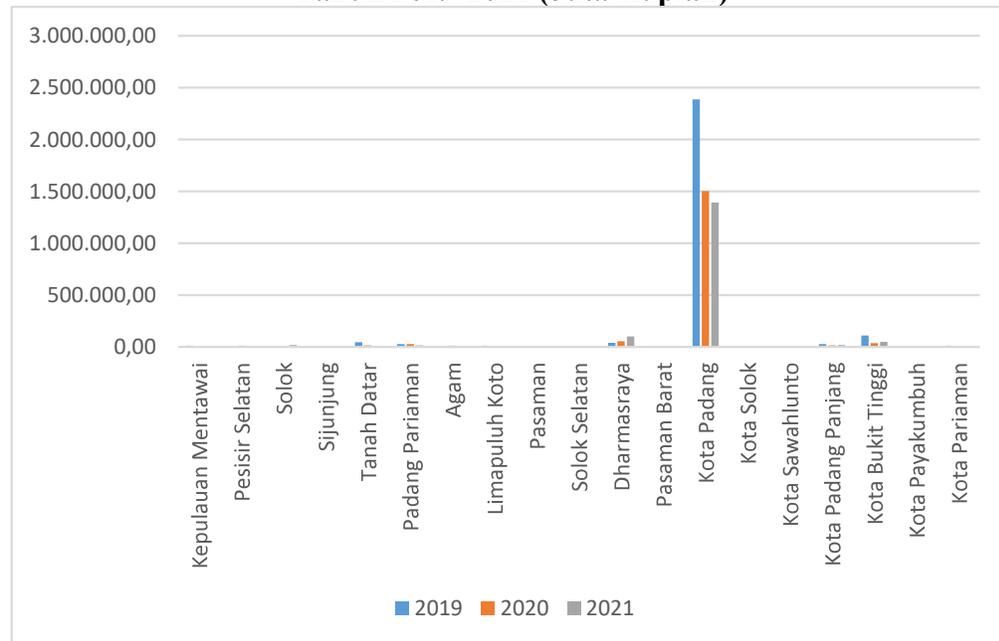


Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah provinsi Sumatera Barat per tahun 2016-2018 terjadi ketimpangan yang sangat signifikan pada kota Padang terhadap wilayah lainnya. Kota Padang memiliki belanja modal paling tinggi dengan rata-rata selama 2015-2019 sekitar Rp 1.644.788,23 (dalam juta rupiah). sementara untuk kabupaten dan kota dengan belanja modal terendah

berada di Kepulauan Mentawai Rp 3.696,55 (dalam juta rupiah). Selanjutnya adalah data jumlah belanja modal dikeluarkan pemerintah tiap kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2021, seperti berikut.

**Gambar 1.6**  
**Jumlah Belanja Modal Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)**



Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah provinsi Sumatera Barat per tahun 2019-2021 terjadi ketimpangan yang sangat signifikan pada kota Padang terhadap wilayah lainnya. Kota Padang memiliki belanja modal paling tinggi dengan rata-rata selama 2019-2021 sekitar Rp 1.853.349,85 (dalam juta rupiah). sementara untuk kabupaten dan kota dengan belanja modal terendah berada di Kepulauan Mentawai Rp 3.071,65 (dalam juta rupiah). Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan

modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. (Syaiful, 2006).

Menurut Sutiono Feri (2018), belanja modal juga merupakan investasi pemerintah karena barang yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Apabila barang modal tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, maka belanja modal secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dalam jangka panjang pula. Sedangkan untuk output belanja modal dalam bentuk barang publik dapat digunakan untuk mendorong efisiensi produktivitas, perdagangan, dan memperlancar akses pemerataan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Peningkatan pengeluaran dari pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi

masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. (Nuaris, 2013).

Menurut Aritonang (2006), salah satu kekurangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah pada minimnya infrastruktur yang digunakan dalam proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu kemampuan setiap wilayah dalam menerima maupun mengelola belanja modal berbeda, hal itu disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas yang infrastruktur yang berbeda pula. Lalu pada akhirnya perbedaan infrastruktur yang ada di tiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah dan dalam hal ini dapat di lihat dari nilai produk domestik bruto (PDRB) juga berbeda.

Indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur kesuksesan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. PDRB perkapita dapat dikatakan sebagai ukuran produktivitas wilayah yang paling umum dan paling diterima secara luas sebagai standar ukuran pembangunan dalam skala wilayah dan Negara, tidak ada satu negarapun didunia yang tidak melakukan pengukuran PDRB baik wilayah maupun perorangan. (Rustiadi, 2009). PDRB per kapita merupakan ukuran kemajuan pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya sehingga pertumbuhan pendapatan menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan. (Todaro, 2008).

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu upaya untuk memperbesar pendapatan perkapita sebagai tolak ukur dalam menentukan pembangunan ekonomi yang dapat menaikkan produktifitas perkapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah keterampilan. Dengan demikian peningkatan PDRB perkapita akan menjadi faktor besar untuk mencapai pembangunan ekonomi. (Sumintoro, 2008). Berikut adalah data jumlah PDRB perkapita di provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019 menurut harga berlaku, seperti yang di tunjukan oleh tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PDRB Perkapita Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah)**

NO	Kab / Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kepulauan Mentawai	29.985,02	30.916,55	31.819,95	32.359,78	33.832,43	34.410,95
2	Pesisir Selatan	18.140,58	18.979,53	19.838,63	20.545,67	18.839,76	19.211,17
3	Solok	23.242,36	24.315,69	25.411,20	26.409,94	25.076,47	25.669,39
4	Sijunjung	25.758,04	26.667,31	27.573,64	28.178,17	28.523,60	29.046,93
5	Tanah Datar	24.168,14	25.342,34	26.552,48	27.764,72	25.805,60	26.468,30
6	Padang Pariaman	28.626,28	30.049,87	31.509,24	31.965,36	27.775,66	28.174,00
7	Agam	26.141,97	27.361,17	28.575,77	29.592,73	27.313,57	27.966,03
8	Limapuluh Koto	25.797,34	26.920,49	28.070,80	29.085,73	28.895,03	29.640,92
9	Pasaman	19.585,14	20.363,49	21.162,53	21.819,69	20.492,80	20.884,21
10	Solok Selatan	21.113,66	21.818,09	22.523,38	23.009,96	21.691,77	21.960,65
11	Dharmasraya	28.303,17	29.065,09	29.823,39	30.078,87	32.737,14	33.344,00
12	Pasaman Barat	23.538,62	24.304,97	25.081,09	25.426,35	26.176,37	26.774,89
13	Kota Padang	40.821,32	42.806,38	44.809,92	46.389,56	48.072,50	49.513,44
14	Kota Solok	36.253,69	37.623,10	39.078,01	40.130,88	38.795,41	39.436,92
15	Kota Sawahlunto	39.167,44	41.002,62	42.903,16	44.545,73	42.503,87	43.076,86
16	Kota Padang Panjang	42.272,81	44.124,34	46.133,03	47.670,67	45.343,43	46.190,48
17	Kota Bukit Tinggi	41.446,30	43.245,47	45.133,22	46.623,24	50.021,80	51.511,08
18	Kota Payakumbuh	29.022,11	30.331,26	31.702,08	32.799,69	31.745,23	32.382,76
19	Kota Pariaman	35.736,70	37.342,52	38.930,17	40.274,72	37.761,77	38.508,50
	Sumatera Barat	29.427,40	30.662,12	31.927,98	32.877,45	32.179,17	32.851,13

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat PDRB perkapita di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat berbeda dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam bidang ekonomi yang terus berkelanjutan. Tingkat PDRB tertinggi terdapat di kota Padang Panjang pada tahun 2019 yaitu mencapai 48.086,53 (dalam ribuan), selanjutnya menyusul kota Bukittinggi dengan 47.067,96 (dalam ribuan) dan kota Padang dengan 46.780,01 (dalam ribuan). Sementara PDRB pada titik terendah berada di kabupaten Pesisir Selatan yang hanya berkisar 20.656,16 (dalam ribuan) yang tak lebih dari 50% jika dibandingkan dengan PDRB kota Padang Panjang. Menurut Todaro (2006), semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan aggregate saving rate yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tipologi daerah berdasarkan infrastruktur jalan terhadap PDRB perkapita di provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana tipologi daerah berdasarkan infrastruktur listrik terhadap PDRB perkapita di provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimana tipologi daerah berdasarkan belanja modal terhadap PDRB perkapita di provinsi Sumatera Barat?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana klasifikasi tipologi daerah berdasarkan infrastruktur jalan terhadap PDRB perkapita di Sumatera barat
2. Untuk menganalisis bagaimana klasifikasi tipologi daerah berdasarkan infrastruktur listrik terhadap PDRB perkapita di Sumatera barat
3. Untuk menganalisis bagaimana klasifikasi tipologi daerah berdasarkan belanja modal terhadap PDRB perkapita di Sumatera barat

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diatntaranya :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, atau untuk peneliti lain yang melakukan penelitian pada tema dan masalah yang sama, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai contoh ataupun masukan pada peneliti yang akan datang.
2. Bagi pihak lain, diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukkan bagi pemerintahan di provinsi Sumatera Barat selaku pengambil kebijakan agar dapat melihat kondisi ketimpangan ekonomi di Sumatera Barat dalam hubungannya dengan infrasruktur yang ada di wilayah Sumatera Barat.

3. Bagi Penulis, untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar sarjana ekonomi pada jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang.